

## II. PERUMUSAN MASALAH

Pengembangan kawasan agropolitan di Jawa Tengah dimulai sejak tahun 2003 di Kabupaten Semarang dan Pemalang, dan pada tahun 2005 berkembang menjadi 6 kabupaten yaitu Magelang, Wonosobo, Batang dan Purbalingga. Kemudian meningkat menjadi 8 pada tahun 2007 karena ada Boyolali dan Karanganyar sedangkan pada tahun 2008 Kabupaten Brebes dan Banjarnegara sehingga saat ini berjumlah 10 Kabupaten. Pada tahun 2010 beberapa kabupaten berinisiasi mengembangkan kawasan agropolitan yaitu Purworejo, Temanggung, Banyumas, Pekalongan, Demak dan Cilacap.

Semangat Pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan kawasan Agropolitan sangat baik namun harus diperhatikan juga bahwa apabila tidak diimplementasikan dengan baik akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan bias antar masing-masing kawasan. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukan pembentukan *region-region* dengan pendekatan administratif dan keterkaitan geografis. Diharapkan dengan pembentukan *region* maka akan terbentuk sinergitas antar kawasan dalam satu *region* dengan komoditas unggulan bersama atau keunggulan masing masing wilayah sehingga terhindar dari persaingan tidak sehat.

Pada kegiatan ini diharapkan dapat menentukan *region-region* dengan pendekatan administrasi dan pendekatan geografi sehingga akan tercipta sinergi pada setiap region sesuai dengan unggulan dan kearifan lokal dan tercipta juga kemitraan yang bersifat lintas daerah dan lintas pelaku yang mengedepankan aspek komunikasi dan koordinasi. Tetapi permasalahan yang muncul adalah apakah dari sisi pengumpulan hingga pemasaran hasil pertanian desa di STA telah melaksanakan tugasnya dengan relatif baik dan sesuai dengan tujuannya?. Penilaian terhadap program agropolitan tidak dapat dilakukan secara parsial karena Program Agropolitan merupakan sebuah kesatuan program pembangunan

pertanian dan ketahanan pangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa.

Konsep agropolitan sebetulnya merupakan konsep yang ditawarkan oleh Friedman dan Douglas (1975) atas pengalaman kegagalan pengembangan sektor industri di beberapa negara berkembang (di Asia) yang mengakibatkan terjadinya berbagai kecenderungan, antara lain:

- a. Terjadinya *hyperurbanization*, sebagai akibat terpusatnya penduduk di kota-kota yang padat;
- b. Pembangunan "modern" hanya terjadi di beberapa kota saja, sementara daerah pinggiran relatif tertinggal;
- c. Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang relatif tinggi;
- d. Pembagian pendapatan yang tidak merata (kemiskinan)
- e. Kekurangan bahan pangan, akibat perhatian pembangunan terlalu tercurah pada percepatan pertumbuhan sektor industri (*rapid industrialization*);
- f. Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat desa (petani);
- g. Terjadinya ketergantungan pada dunia luar.

Penerapan konsep agropolitan di lapangan haruslah:

- a. Melibatkan sejumlah besar petani perdesaan (ratusan sampai dengan jutaan) bersama-sama pengembangan kota-kota pusat pertanian untuk pembangunan pertanian secara *integrated*;
- b. Keterlibatan setiap instansi sektoral di perdesaan untuk mengembangkan pola agribisnis dan agroindustri harus berjalan secara simultan;

- c. Tercapainya keserasian, kesesuaian dan keseimbangan antara pengembangan komoditas unggulan dengan struktur dan skala ruang yang dibutuhkan;
- d. Adanya kesinambungan antara pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana wilayah, seperti irigasi dan transportasi antara daerah produksi pertanian dan simpul-simpul jasa perdagangan dalam program perencanaan jangka panjang;
- e. Realisasi dari pengembangan otonomi daerah untuk mengelola kawasan pertanian secara mandiri, termasuk kewenangan untuk mempertahankan keuntungan komparatif bagi penjaminan pengembangan kawasan pertanian;
- f. Diperlukan adanya kemudahan-kemudahan dan proteksi terhadap jenis komoditas yang dihasilkan baik di pasar nasional maupun luar negeri, pada saat kondisi *infant-agroindustry*;
- g. Secara ekologis, hampir sulit untuk dihindari akan terjadinya efisiensi produksi pertanian ke arah monokultur-agroindustri dalam skala besar yang rentan.

Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan adanya studi Evaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan tahun 2010. Studi ini bermanfaat untuk mengetahui efektifitas program Agropolitan di Provinsi Jawa Tengah guna perbaikan program ke depan. Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan/pengembangan Kawasan Agropolitan adalah :

- a. Belum optimalnya pengembangan pasar desa, kelembagaan ekonomi mikro, usaha tani dan teknologi perdesaan berbasis pertanian.
- b. Belum terwujudnya sinergitas program/kegiatan pembangunan pertanian yang terintegrasi dalam satu kesatuan kawasan secara spasial dan fungsional.

- c. Belum adanya komitmen yang jelas terhadap penganggaran dan program/ kegiatan pembangunan pertanian yang mengarah pada satu kawasan.
- d. Belum optimalnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar *stakeholders* dalam pembangunan kawasan.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja kawasan adalah mewujudkan pengembangan Kawasan Agropolitan kedepan, yang dikemas dalam suatu Model Pembangunan Ekonomi Wilayah dengan pendekatan kawasan dan berbasis agro (Regionalisasi Kawasan Agropolitan), yang dilandasi prinsip-prinsip:

- a. Perencanaan pembangunan dalam satu kesatuan geografis (kawasan) yang bersifat fungsional dan dinamis.
- b. Pembangunan yang berbasis sumberdaya lokal dan partisipasi masyarakat lokal.
- c. Pengembangan komoditas unggulan strategis/andalan.
- d. Keterkaitan sistem hulu-hilir dalam aktivitas produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran dan permodalan, melalui jejaring (*networking*) antara industri kecil, sedang dan besar.
- e. Sinergitas program dan kegiatan pembangunan kawasan tanpa menghilangkan karakteristik/kespesifikan kawasan (kearifan lokal) dengan melibatkan berbagai *stakeholders*.

Regionalisasi adalah merupakan proses terbentuknya suatu *region* yang terdiri dari beberapa daerah administratif dan secara keruangan memiliki relevansi atau keterkaitan geografis (GTZ-RED dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2005). Melalui regionalisasi diharapkan dapat terwujud sinergitas program/kegiatan strategis dalam mengembangkan sumber daya ekonomi yang berbasis pada keunggulan dan karakteristik wilayah, serta didukung oleh kemitraan yang bersifat lintas daerah dan

lintas pelaku. Kekuatan regionalisasi sebagai komponen penting bagi keberhasilan pembangunan adalah menggunakan dan mengedepankan aspek Komunikasi dan Koordinasi dalam menjalin Kerjasama (3K) satu dengan lainnya dalam mencapai komitmen bersama.

